

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL:
MAMPUKAH MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI DALAM PELAPORAN KEUANGAN?
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RAFIKA EWID BAHAR
NIM. 12030111120004

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rafika Ewid Bahar

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **Implementasi Akuntansi Berbasis
Akrual: Mampukah Meningkatkan
Akuntabilitas dan Transparansi
Dalam Pelaporan Keuangan? Studi
Kasus Pada Pemerintah Kota
Semarang**

Dosen Pembimbing : Anis Chariri, SE., M.Com.,Ph.D.,Akt.

Semarang, 08 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

(Anis Chariri,SE.,M.Com.,Ph.D.,Akt.)

NIP. 19670809 199203 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Rafika Ewid Bahar

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120004

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua:
Mampukah Meningkatkan Akuntabilitas dan
Transparansi Dalam Pelaporan Keuangan?
Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Juni 2015

Tim Penguji

1. Anis Chariri, SE., M.Com.,Ph.D.,Akt (.....)

2. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D (.....)

3. Dr. P. Basuki H, MBA, MAcc., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rafika Ewid Bahar, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua: Mampukah Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelaporan Keuangan? Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan / atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 08 Juni 2015

Yang membuat pernyataan,

Rafika Ewid Bahar

NIM: 12030111120004

ABSTRACT

This study aimed to understand the meaning of accrual based accounting, interpreting the implementation of accrual based accounting, and analyzing the role of accrual based accounting in enhancing accountability and transparency in financial reporting of the government agencies in Semarang.

Interpretive approach and institutional theory was used in this study. The analyzed data derived from interviewing relevant agencies. Data obtained through direct interviews.

The results of this study in Semarang showed that the implementation of accrual based accounting was acknowledge by the compiler of government financial statements. This study found that evident regulation, effective communication, adequate facilities and infrastructure, and readiness of human resources for accounting activity are important aspects of success in implementation of accrual based accounting. The implementations on accrual based accounting was effectively improve accountability and transparency in financial reporting.

Keywords: Accrual Based Accounting, Institutional Theory, Accountability, Transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dari akuntansi berbasis akrual, menginterpretasi kesuksesan penerapan akuntansi berbasis akrual, dan menganalisis peran akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaporan keuangan di Kota Semarang.

Penelitian ini menerapkan pendekatan interpretif dengan teori institusional. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan dinas-dinas terkait. Data tersebut diperoleh melalui proses wawancara secara langsung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan basis akrual telah dipahami oleh penyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang jelas, komunikasi yang efektif, sarana dan prasarana penunjang yang memadai dan kesiapan sumber daya manusia dibidang akuntansi merupakan aspek-aspek penentu keberhasilan penerapan basis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Kota Semarang telah berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Kata kunci: Akuntansi Berbasis Akrual, Teori Institusional, Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi.

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Sejajarkan semua urusan yang diberikan kepadamu dengan hati yang lapang, peruntukkan hanya untuk mengharap ridho Allah swt semata, karena kita tidak pernah tahu dari pintu mana Allah swt akan menolong kamu (Ibu)

SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG DAPAT MEMBERIKAN KEMANFAATAN BAGI SESAMANYA DAN TIDAK MENYAKITI SESAMANYA (ANONIM)

Jadi orang harus baik tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Seburuk-buruknya orang lain kita jauh lebih buruk. Sesalah-salahnya orang lain lebih salah diri kita (Atalia Kamil

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya,

Bapak Khaeron-Ibu Suwanto Rini

Bapak dan Ibu Dosen

Bapak dan Ibu Guru

Kakak dan adik saya tercinta,

Akhmad Baedowi, Fiqi Nur dan Revaliana

Sahabatku,

Kalian selamanya selalu menginspirasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillahirrabil'alamin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq , hidayah dan anugerah-NYA dan shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi yang berjudul: **“Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: Mampukah Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelaporan Keuangan? Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis merasa masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam skripsi ini. Namun penulis merasa sangat terbantu karena memiliki keluarga, sahabat dan dosen pembimbing yang memberikan kontribusi yang tidak ternilai. Dengan segala bantuan, bimbingan dan doa restu sampai tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Teruntuk Ibunda tercinta Suwanto Rini dan ayahanda Khaeron tersayang. Terima kasih untuk selalu menguatkan dalam setiap lantunan doa. Keringat, jasa dan pengorbanan untuk selalu memberikan terbaik untuk penulis, menopang dengan pelukan hangat ketika penulis terjatuh dan ingin menyerah, membangkitkan semangat motivasi dan dukungan untuk selalu mengingatkan impian-impian yang ingin diwujudkan kepada penulis. Alhamdulillah terima kasih ya Allah Engkau telah menganugerahkan orangtua terbaik. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, perlindungan, dan limpahan kasih sayang-NYA kepada kedua beliau. Amin.
2. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. selaku Dosen Pembimbing tercinta. Terima kasih Pak, atas segala kesabaran, bimbingan, ilmu yang diberikan, motivasi, doa, semangat dan pengalaman yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis selalu mendapat ilmu baru dan skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.
4. Bapak Prof. Dr. Much Syafrudin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali tercinta
6. Seluruh civitas akademika baik dosen, staf, karyawan dan jajaran yang bertugas pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama ini. Terima kasih khususnya kepada Bapak Suyitno, Ba atas bantuan, kemudahan administrasi, dan informasi yang diberi kepada penulis tentang beasiswa dan info lain-lain yang sangat berguna Pak.
7. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang beserta staf yang bertugas terimakasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di dinas-dinas Kota Semarang.
8. Seluruh Kepala Dinas Pemerintah Kota Semarang dan staf yang bertugas, khususnya DPKAD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pasar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BKD, Dinas Tata Kota dan Perumahan, dan Inspektorat Kota Semarang terimakasih telah bersedia membantu selama penulis melakukan penelitian di dinas terkait.
9. Kakakku Akhmad Baedowi, Terima kasih atas doa dan kebersamaan kita berbagi rasa, suka, dan duka.
10. Untuk Adik-adikku tersayang Fiqi Nur Samsu Ahmad dan Revaliana Yusika Firdaus melihat senyummu selalu membuatku bersemangat menjalani setiap aktivitas, tawa canda kalian yang membuat penulis termotivasi untuk selalu ingin menjadi kakak, sahabat, teman terbaik dan membuat penulis untuk selalu ingin membahagiakan kalian selalu.

11. Untuk Pakde Suliyanto dan Bude Lis terima kasih atas bantuan, doa dan hadiah baju kebaya yang khusus dibuatkan untuk penulis saat wisuda nanti. Kakak sepupu Mbak Lia dan Mbak Vani atas doanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki untuk kedua beliau. Amin.
12. Mas sepupu Nafiq Almuzaki dan teteh Leni Nuraeni, terima kasih atas liburan gratis yang selalu mengajak penulis berwisata menyenangkan, terima kasih atas bantuan dan tumpangnya selama penulis bermain-main di Jogja saat mengisi liburan kuliah. Untuk para keponakanku Nitya, Rafif dan Athifa selalu ada rindu dan pelukan saat bermain bersama kalian. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian ya mas dan teteh. Amin.
13. Teruntuk semua keluarga, kerabat dan saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih untuk selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan sebaik mungkin.
14. Sahabat kecilku Anindia Novi Ardiyani, terima kasih atas doa, motivasi dan selalu mengingatkan mimpi-mimpi yang pernah kita tulis bersama. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 16 tahun ini semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan disetiap langkah kita membahagiakan orang tua kita ya. Amin.
15. Arfianty Reka, terimakasih sudah dengan sabar membantu penulis apabila menemui kesulitan dan selalu direpotkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikanmu ya fi 😊
16. Adetya Agung Kusumo Bawono, teman pertama saat diterima di akuntansi, terimakasih selalu mau direpotkan, dan menemani saat ke Jogja. Terima kasih untuk masukan saat berbagi cerita dan cita-cita. Semoga Allah SWT mendengar dan mengabulkan doa-doa baik kita ya Det. Amin.
17. Sahabat dan keluarga “PKDP”: Arfianty Reka (*master of IT*), Nofrizal Damai (*master of abstract*), Chandra Ayu (*master of culinary*), Retha Maya (*master of make up*), Prapanca (*master of game*) , Rhety Ayu

(*master of calm*) dan Andika Nugroho (*master of driver*),. Terimakasih telah memberikan pelajaran berharga, atas bantuannya, canda tawa, pengalaman baru, jalan-jalan asyik, waktu kebersamaan berbagi cerita dengan kalian selama menempuh studi di akuntansi. Terimakasih juga untuk Bude Sunarti, atas rumah yang selalu menjadi *basecamp* anak-anak PKDP. Semoga Allah SWT selalu mempererat tali persahabatan kita ya. Mohon maaf apabila selama berteman terdapat tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan dari penulis. Semoga kita dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama dan bangsa ya “gaes”. Amin.

18. Natasya E.N, terimakasih atas motivasi dan doanya selalu menguatkan penulis saat detik-detik menghadapi sidang.
19. Lisa Melyana, terimakasih *master of edit* sudah mau direpotkan malam-malam buat bantuin penulis.
20. Nugraha Fitra Andani, terimakasih atas doa dan sarannya dan selalu menghadirkan hadiah-hadiah lucu buat penulis.Semoga Allah SWT membalas kebaikan kamu da ☺
21. Rina Sulistyia terimakasih ya nul atas doa dan motivasinya ayo segera menyusul ☺
22. Aulia Riski Arjanggie dan Nuansa Rizky Saura, terimakasih telah rela diculik untuk berpanas-panasan menemani saat penulis mencari data di lapangan.
23. Teman-teman seperjuangan: Vanessa, Adila, Rista, Ega, Nia, Nonik, Sri Candra, Ade Rizki, Isti N, Agustina, Alfa, Retha, Occi, Iput, Nolanda, Nurul, Alfi, Ipung, Puspa, Esther, Putri K, Uswah, Gati, Willy, Faisal, Reza Res, Inug dan Debra. Terimakasih atas doa dan semangat kalian.
24. Sahabat-sahabat sejak SMP: Shabrina, Suci, Hana, Dias, Elsa, dan Okta. Terimakasih semangat dan doa yang telah kalian berikan. Semoga kelak kita menjadi wanita-wanita sukses. Amin.

25. Untuk teman-teman “hits” KKN Kembang Sari, Tasya, Anggita, Oinike, Maya K, Joe, Mas Dewan, Bang Ginta, Shinta, Ines, Gloria, Syarif, Terimakasih telah menjadi bagian dari keluarga baruku, terimakasih atas kebersamaannya, atas kenangannya dan pengalamannya sangat senang bertemu kalian semua. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesempatan untuk selalu berkumpul ya, amin.
26. Kakak angkatan 2010: Kak Nisrina, Kak Saras, Kak Fauziah dan Kak Widya, terimakasih atas bantuan dan motivasinya.
27. Para costumer, resailer dan supplierku tersayang, terimakasih atas doa-doanya ya. Semoga kalian selalu menjadi pelanggan setia di “revastore” dan selalu dilimpahkan banyak rezeki. Amin.
28. Keluarga Akuntansi 2011, kalian luar biasa dan istimewa, senang bisa menjadi bagian didalamnya. Jaga kekompakan kita dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses dunia dan akhirat di jalan kita masing-masing. Amin.
29. Teman seperjuangan bimbingan Meneer Chariri, Iu, Najib, Mimma, Satrio, Naris dan Sinta yang selalu menemani mengantri di depan ruangan PD 1.
30. Keluarga KMW 2011 dan 2012 terimakasih atas pengalamannya.
31. Adik-adik angkatan yang menemani naik Merbabu: Romi, Naufal, Suesty, Yuda, Ahsan, Fahri, Khisnun, Kemal, dan Wira.
32. Dek Venecia, Hellen, Arifa, Dea dan Dewanta selaku siswa “H&R Private Centre” yang selalu mengingatkan kapan “miss” diwisuda terimakasih atas doa dan motivasinya.
33. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Kesempurnaan hanya Milik Allah SWT, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi. Amin.

Semarang, 08 Juni 2015

Rafika Ewid Bahar
NIM. 12030111120004

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Institusional	9
2.1.2 Makna Institusi dan Institusionalisasi	11
2.1.3 Konsep Basis Akrual	14
2.1.4 Akuntabilitas	17
2.1.5 Transparansi.....	18
2.1.6 Kebijakan Pelaporan Keuangan.....	20
2.1.7 Kebijakan Akuntansi.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Design Penelitian.....	30
3.1.1 Pemilihan desain penelitian	31

3.1.2 Pendekatan penelitian	32
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.3 Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian	34
3.4 Instrumen Penelitian	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	40
3.7 Pengecekan Validitas Temuan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Basis AkruaI: Konsep yang Tidak Sulit Untuk Diterapkan	44
4.2 Aspek-Aspek Penentu Kesuksesan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI	50
4.3 Basis AkruaI Mampu Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Implikasi penelitian	82
5.3 Keterbatasan penelitian	83
5.4 Saran riset	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Institusionalisme Baru	9
Tabel 2.2 Tiga Konsepsi Institusi.....	12
Tabel 3.1 Daftar SKPD sebagai objek penelitian.....	35
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	28
Gambar 4.1 Pola Komunikasi Alur Belanja Pelaporan Keuangan Dinas Pasar ...	54
Gambar 4.2 Arus komunikasi dan Pembagian Kerja Pelaporan Keuangan Kota Semarang.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat Perijinan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	89
Surat Perijinan Dinas DPKAD Kota Semarang	92
Surat Perijinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.....	93
Surat Perijinan Dinas Pasar Kota Semarang	94
Surat Perijinan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang	95
Surat Perijinan Dinas Kesehatan Kota Semarang	96
Surat Perijinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	97
Surat Perijinan Badan Kepegawaian Daerah	98
Surat Perijinan Inspektorat Kota Semarang	99
Proposal Izin Penelitian.....	100
Jadwal dan Informan Penelitian	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaporan keuangan merupakan media komunikasi penting bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah. Pelaporan keuangan laporan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban atas anggaran dan pengalokasian sumber daya yang digunakan (Damayanti, 2012). Oleh karena itu secara spesifik laporan keuangan harus dapat mencerminkan kualitas kinerja Pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersifat baik, misalnya pelayanan jasa kepada publik secara prima, peningkatan profesionalisme dalam menggunakan sumber daya yang dipercayakan dari masyarakat dan praktik bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peranan laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas kepada publik telah mendorong pemerintah untuk senantiasa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Transparansi dan kualitas anggaran Pemerintah berperan vital sebagai upaya untuk membangun kualitas demokrasi dan pemerintahan yang efektif (Harun, 2010). Pemerintah yang efektif merupakan salah satu indikator dalam peningkatan kualitas kemakmuran masyarakat dalam suatu negara.

Selain itu pelaporan keuangan mempunyai tujuan umum yang berkaitan dengan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya ekonomi yang dibutuhkan untuk operasi yang

berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, dan risiko akan ketidakpastian yang terkait (Christensen, 2007). Pelaporan keuangan juga memberikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan apakah sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk batas anggaran yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas publik berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Dalam prinsip akuntansi terdapat dua metode basis pencatatan akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah pencatatan transaksi ekonomi dan transaksi lainnya pada saat kas diterima atau dikeluarkan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat. Sedangkan basis akrual akuntansi adalah pencatatan transaksi ekonomi atau peristiwa lainnya yang mewajibkan transaksi dicatat pada saat terjadinya suatu transaksi.

Topik mengenai implementasi basis akrual accounting pada sektor publik menarik untuk diteliti karena konsep ini masih tergolong baru. Basis akrual merupakan salah satu isu terhangat yang dihadapi oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia mengingat dengan dikeluarkan PP No 71 Tahun 2010 yang mengharuskan pada tahun 2015 pada sektor publik terutama di instansi Pemerintah sudah harus melakukan adopsi basis akrual secara keseluruhan.

Fenomena di Indonesia, upaya untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi akuntansi yang akurat dan transparan telah dilakukan sejak dikeluarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Setelah itu, dilanjutkan dengan

dikeluarkannya UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa Pemerintah Daerah yang belum menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

West & Carnegie, (2005) mengatakan bahwa perubahan standar akuntansi pada sektor publik ke basis akrual dilatarbelakangi dengan tingginya peningkatan kebutuhan akan akuntabilitas pada institusi sektor publik terutama instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Gupta, (2009) menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara transparansi dan akuntabilitas dalam mengadopsi penganggaran berbasis akrual bila dibandingkan dengan anggaran berbasis kas. Hal ini juga menjelaskan bahwa penganggaran dengan berbasis akrual adalah solusi terbaik untuk mengakomodasi efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian mengenai akuntansi berbasis akrual di sektor publik terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah belum menjelaskan secara detail dalam memberikan bukti dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Selain itu penelitian mengenai akuntansi berbasis akrual dilakukan di negara-negara yang menjadi pelopor sistem akuntansi berbasis akrual terutama di Negara Italia juga belum dapat mengungkapkan manfaat riil dari implementasi tersebut (Mardiasmo, 2009).

Fokus riset yang akan diangkat pada penelitian ini adalah implementasi mengenai akuntansi berbasis akrual mampukah meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi dalam pelaporan keuangan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengungkap makna atau esensi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut sarat dengan keperilakuan, sikap dan pandangan manusia sehingga sangat tepat untuk diteliti dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Inti dari paradigma interpretif adalah memahami bentuk fundamental dari dunia sosial pada tingkat pengalaman subjektif seseorang (Burrell & Morgan, 1979). Paradigma interpretif lebih menekankan pada makna seseorang terhadap simbol. Tujuan penelitian ini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*), bukan *to explain* dan *to predict* bukan seperti paradigme positivisme (Triyuwono, 2012). Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan temuan-temuan yang bersifat lokal berkaitan dengan implementasi akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan.

Kota Semarang dipilih sebagai *setting* penelitian karena merupakan kota yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual perdana di Indonesia. Selain itu penelitian untuk menerapkan basis akrual pada sektor publik sangat menarik minat bagi peneliti mengingat banyak pro dan kontra dalam menerapkan basis akrual. Wynne dalam Halim, (2008) misalnya, mempertanyakan apakah penerapan basis akrual pada sektor publik cukup bermanfaat sebagaimana sektor swasta.

Akuntansi akrual pada organisasi swasta ditujukan untuk mendukung tujuan organisasi untuk mencari laba (*profit*) dengan menandingkan informasi

pendapatan dan beban secara akurat. Sementara, organisasi sektor publik tidak untuk mencari laba. Perbedaan tujuan utama organisasi tentunya berdampak kepada penyajian informasi dan pelaporan keuangan yang berbeda pula, apakah laporan keuangan yang dihasilkan sektor swasta masih sesuai jika diterapkan pada sektor publik. Berbagai pro dan kontra tersebut menjadi alasan utama mengapa riset ini dilakukan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Pencatatan akuntansi dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual masih sangat baru di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan akuntansi berbasis akrual perlu dilakukan pembahasan secara komprehensif mengingat masih banyak instansi Pemerintah dalam tahap kesiapan dan pengaplikasian pendekatan baru ini. Penelitian ini melakukan kajian mendalam untuk menganalisis manfaat riil implementasi basis akrual sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Atas dasar tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan instansi Pemerintahan terutama di Kota Semarang dengan berusaha menjawab pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana makna akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Semarang?
2. Bagaimana Pemerintah Kota Semarang sukses dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual?

3. Bagaimana basis akrual accounting dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kota Semarang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam pada *setting* penelitian dan berusaha mengungkapkan secara apa adanya. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memahami makna akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Semarang dan menginterpretasi mengenai pemahaman informan tentang esensi basis akrual accounting.
2. Menginterpretasi kesuksesan Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.
3. Menganalisis basis akrual accounting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Pemerintah Kota Semarang.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian tentang basis akrual accounting diharapkan dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya terutama bidang akuntansi sektor publik atau pemerintahan.
2. Bagi instansi pemerintahan atau SKPD terkait dapat digunakan untuk menambah informasi dan dapat dijadikan masukan serta

evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan basis akrual accounting secara penuh di tahun 2015.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian yang diikuti dengan pertanyaan penelitian mendasar, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai isi keseluruhan dari tulisan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian sejenis, dan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian dan analisis data. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis mengenai informan dalam memaknai basis akrual accounting pada Pemerintah Kota Semarang, menginterpretasikan kesuksesan Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. dan menganalisis bagaimana basis akrual accounting dalam meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi pada Pemerintah Kota Semarang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi keterbatasan dan saran bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Institusional

Teori institusional adalah teori yang menjelaskan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya serta berkeinginan mengungkap realitas ketidakkonsistenan dalam tampilan formal organisasi (Di Maggio & Powell, 1991, hlm. 12). Dalam teori institusional baru memandang bahwa organisasi berubah belum tentu untuk mencapai efisiensi, tetapi demi kepentingan legitimasi dan homogenisasi dalam kelompok sejenis.

NIS tidak hanya tertarik kepada koherensi dan kekuatan keberadaan suatu institusi dalam organisasi, tetapi juga berusaha menemukan posisi atau tempat institusi dalam suatu tradisi organisasi (Selznick, 1996). Teori institusional baru akan lebih jelas digambarkan dengan tabel 2.1 sebagai berikut,

Tabel 2.1
Institusionalisme Baru

Indikator	Baru
<ul style="list-style-type: none">• Konflik Kepentingan	Lingkungan sekitar
<ul style="list-style-type: none">• Sumber inersia (inertia)	Perlu legitimasi
<ul style="list-style-type: none">• Tekanan structural	Peran simbolik dari struktur formal
<ul style="list-style-type: none">• Kesatuan organisasi	Bidang (Field), sektor atau masyarakat
<ul style="list-style-type: none">• Sifat penyatuan	Konstitutif

• Lokus institusionalisme	Bidang atau masyarakat
• Dinamika Organisasi	Tetap/bertahan/Persistence
• Dasar kritik atas utilitarianisme	Teori tindakan
• Bukti kritik atas utilitarianisme	Aktivitas yang tidak reflektif
• Bentuk kunci kognisi	Klasifikasi, rutin, naskah, skema
• Psikologi sosial	Teori atribusi
• Basis Kognitif tatanan	Kebiasaan, tindakan praktis
• Tujuan	Ambigu
• Agenda	Kedisiplinan

Sumber: (Di Maggion & Powell, 1991. hlm. 13)

Dalam analisis organisasionalnya, NIS lebih fokus untuk menggambarkan bagaimana respons organisasi terhadap konflik dengan mengembangkan struktur administrasi yang terkadang sangat rumit (Scott & Meyer, 1991). NIS, tertarik pada irasionalitas yang terjadi dalam struktur formal itu sendiri, menghubungkan difusi departemen tertentu dan prosedur operasi yang mempengaruhi antar organisasi, kesesuaian, dan tindakan persuasif terhadap budaya (Di Maggion & Powell, 1991; Meyer & Rowan, 1991).

NIS menggambarkan organisasi adalah sekumpulan karakteristik individu sebagai hasil dari interaksi sosial. Institusionalisme menentang gagasan rasionalitas penuh manusia yang seperti yang biasa diterapkan oleh ahli keperilakuan di bidang ekonomi, psikologi dan ilmu politik (Carruthers, 1995; Di Maggion & Powell, 1991, hlm 8). New institusional menyakini bahwa orang-orang hidup dalam dunia merupakan hasil dari interaksi sosial diantara mereka.

NIS menyatakan bahwa organisasi secara alami dipengaruhi baik oleh lingkungan teknis dan institusi (Di Maggion & Powell, 1991). Orang dapat hidup dalam situasi sosial yang dibangun dan dikelilingi oleh makna dan aturan yang bersifat “*taken for granted*”, sehingga mereka dapat bertindak secara tidak sadar dan tidak disengaja (Carruthers B., 1995).

2.1.2 Makna Institusi dan Institusionalisasi

Dalam institusionalisme, institusi bukan hanya lembaga. Institusi merupakan produk bentukan manusia dan hasil dari tindakan tertentu dari para aktor (Di Maggion & Powell, 1991). Nabila & Scapens, (2005) mendefinisikan institusi sebagai:

“the shared taken for granted assumption which identify categories of human actors and their appropriate activities and relationship.institutions are tacitly accepted as “the way things are done” in the organization and, as such, are the unconcious assumption which underpin organizational behaviour”

Budaya dan struktur juga merupakan bentuk institusi dalam suatu organisasi. Budaya memiliki peran penting dalam sebuah organisasi dalam membatasi unsur yang diterima dalam proses mengadopsi unsur-unsur lingkungan institusional.

Institusi merupakan pola sosial yang menunjukkan proses atau prosedur tertentu (Nabila & Scapens, 2005). Saat pola ini diterapkan secara berulang-ulang dengan pengawasan tertentu maka pola ini menjadi terlembagakan. Jepperson, (1991) berpendapat bahwa institusi merupakan suatu tatanan sosial atau pola untuk mencapai ketetapan tertentu. Aturan formal, prosedur kepatuhan dan

standar prosedur operasional dalam organisasi menjadi institusi-institusi yang mengatur kehidupan organisasi.

Ciri-ciri umum institusi menurut Bogasan, (2000) yaitu:

1. Struktur yang terbentuk berdasarkan interaksi antara para aktor
2. Memiliki beberapa tingkatan kesepakatan umum atau *values*
3. Terdapat tekanan untuk adaptasi

Institusi menjadi fenomena umum yang menjadi entitas penting dalam mengatur kehidupan manusia.

Selanjutnya Scott, (1995) mengemukakan tiga konsepsi institusi (lihat pada tabel 2.2).

Tabel 2.2
Tiga Konsepsi Institusi

	Regulatif	Normatif	Kognitif
Basis Kepatuhan	Manfaat	Kewajiban sosial	Taken for granted
Mekanisme	Coercive	Normative	Mimetic
Logika	Instrumentalitas	Ketepatan	Ortodoksi/ketaatan pada ajaran tertentu
Indikator	Aturan, hukum, sanksi	Sertifikasi, akreditasi	Kelaziman, Isomorphism
Basis Legimitasi	Hukum, sanksi	Aturan Moral	Dukungan budaya, kebenaran secara konseptual

Sumber: (Scott W. , Organizations Rational, Natural, and Open System, 2003)

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa terdapat mekanisme institusi dalam tiga elemen kunci institusi. Ketiga elemen tersebut menunjukkan tiga aturan dasar tindakan organisasi yaitu aturan resmi, norma-norma dalam organisasi dan aturan tidak resmi. Aturan resmi muncul dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa organisasi. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini akan memunculkan sanksi secara hukum. Norma-norma yang berlaku dalam organisasi sebagai wujud dari kewajiban sosial yang dikelola secara moral. Bentuknya berupa akreditasi dan sertifikasi yang berlaku bagi organisasi. Selain kedua aturan dasar tersebut, biasanya organisasi juga memiliki aturan tidak resmi. Aturan ini biasanya bersifat kebiasaan dan budaya yang muncul dari ritunitas keseharian organisasi.

Pengertian dari teori institusional di atas, maka penelitian ini relevan untuk menggunakan teori institusional karena suatu organisasi dipengaruhi oleh konteks yang melingkupi institusi tersebut. Konteks yang melingkupi sektor pemerintahan, misalnya adanya aturan dasar berupa aturan resmi, norma-norma dan aturan tidak resmi yang harus dipenuhi pada institusi tersebut. Selain itu adanya basis legitimitasi berupa hukum dan sanksi yang ada di operasional kerjanya jika melakukan pelanggaran terhadap aturan dasar. Oleh karena itu, kebijakan baru yang diterapkan pada lembaga pemerintahan harus mempertimbangkan konteks institusional yang ada pada organisasi tersebut

Implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan suatu tatanan baru di bidang reformasi manajemen sektor publik dalam hal ini pada sektor pemerintahan. Hal ini tentu berpengaruh pada budaya dan struktur yang

merupakan bentuk institusi. Budaya memiliki peran penting dalam sebuah organisasi dalam membatasi unsur yang diterima dalam proses mengadopsi unsur-unsur lingkungan institusional.

Sebagai salah satu wujud Institusi, Pemerintah dituntut untuk menjaga kebutuhan dalam mentaati dan memelihara dukungan pada pengaruh politik yang dihadapi sebagai organisasi dalam sektor pemerintahan. Tatanan sosial atau pola untuk mencapai ketetapan tertentu. Aturan formal, prosedur kepatuhan dan standar prosedur operasional dalam organisasi merupakan syarat mutlak menjadi institusi-institusi yang mengatur kehidupan organisasi.

Penggunaan akuntansi berbasis akrual pada lembaga Pemerintah merupakan contoh dari kepatuhan terhadap amanat perundang-undangan yang berlaku bagi organisasi pemerintahan. Sebagai wujud institusi yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual secara perdana maka kesuksesan Pemerintah Kota Semarang menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga Pemerintah sangat tepat apabila dikaji dari teori institusional baru.

2.1.3 Konsep Basis Akrual

Menurut Simanjuntak, (2010) basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi penerapan basis akrual dinilai sangat sesuai karena pencatatan dicatat saat terjadinya arus sumber daya. Basis

akrual juga menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro dan menyediakan informasi komprehensif.

Menurut IFAC, (2003) *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam *Public Committee Study* Nomor 14 tentang *Transition to The Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Governments Entities (second edition)* kelebihan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik atau pemerintahan yaitu:

1. Memberikan gambaran bagaimana pemerintah mendanai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya;
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi segala kewajiban dan komitmen-komitmen yang ada;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah atau instansi dan perubahan posisi keuangannya;
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil akhir penggunaan sumber daya yang dikelolanya;

Kekurangan dalam penerapan basis akrual menurut IFAC, (2003) antara lain:

1. Biaya-biaya yang cukup besar yang harus disiapkan untuk menangani hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya untuk penilaian aset;
 - b. Biaya untuk penyiapan kebijakan akuntansi;
 - c. Biaya membangun sistem akuntansi termasuk membeli sarana dan prasana untuk mendukung penerapan sistem tersebut;
 - d. Biaya untuk menyiapkan sumber daya yang kompeten untuk menangani masalah akuntansi berbasis akrual;
2. Basis akrual pada dasarnya merupakan desain untuk mengukur laba sehingga kurang memberikan arti penting bagi sektor publik atau pemerintahan;
 3. Basis akrual lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan basis kas sehingga kemungkinan terdapat badan legislative (DPR/DPRD) kurang memberikan atensi dalam menelaah laporan keuangan sehingga mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan;
 4. Memberikan ruang yang lebih luas dalam hal *profetional judgements* baik oleh penyedia laporan keuangan (entitas pelaporan/entitas akuntansi) maupun auditor pemerintah.

Implikasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada entitas pemerintahan bukanlah perkara mudah. Mengingat banyaknya pro dan kontra dari kelebihan dan kekurangan basis akrual itu sendiri. Untuk itu diperlukan persiapan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh entitas pemerintahan dalam mengemban amanat dari undang-undang. Konsep basis akrual ini relevan dengan riset yang akan dilakukan lembaga pada entitas pemerintahan yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintahnya.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada kepada entitas pelaporan dalam dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam hal ini akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik apabila menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sektor pemerintahan memerlukan bentuk laporan keuangan yang berbeda dengan sektor privat karena perbedaan akuntabilitas yang dihadapi.

Konsep akuntabilitas dipilih karena pada penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan aspek akuntabilitas pada pelaporan keuangan khususnya Pemerintah Kota Semarang. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban unit organisasi atau instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi atau dimana fokus penelitian ini unit organisasi sektor publik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Sektor pemerintahan harus melaksanakan pertanggungjawaban secara politik (akuntabilitas politik). Aspek akuntabilitas keuangan yang paling penting adalah apakah dana publik yang dibelanjakan sesuai dengan kesepakatan dengan dewan perwakilan (lembaga legislatif) (Boothe, 2007).

Menurut Rasul, (2003) akuntabilitas keuangan merupakan suatu kewajiban lembaga publik untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewenangannya dalam menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien,

efektif dan tidak kebocoran serta korupsi. Akuntabilitas keuangan sangat penting karena menjadi pusat perhatian utama bagi masyarakat dimana mengharuskan lembaga publik untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar khususnya masyarakat.

Selain berfokus pada akuntabilitas keuangan, penelitian ini juga akan mengacu pada akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi dibagi menjadi dua yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal berlaku bagi setiap tingkatan organisasi di dalam organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengawas publik baik individu ataupun kelompok secara hierarki berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada atasannya mengenai perkembangan kinerja kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan melaksanakan akuntabilitas internal pemerintah telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) (Rasul, 2003).

Akuntabilitas eksternal organisasi melekat pada lembaga negara sebagai suatu organisasi pada sektor publik untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan hasil dari pelaksanaan amanat tersebut dapat dikomunikasikan kepada pihak eksternal organisasi tersebut yaitu kepada masyarakat luas (Rasul, 2003).

2.1.5 Transparansi

Menurut Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Prinsip transparansi menurut Krina, (2003) menekankan pada dua aspek penting yaitu, komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Indikator-indikator dari transparansi menurut Krina, (2003) adalah sebagai berikut:

1. Adanya penyediaan informasi yang jelas, terbuka, jujur tentang tanggungjawab.
2. Adanya mekanisme sistem pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar.
3. Kemudahan dalam mengakses informasi
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non publik dan media massa sebagai sarana untuk meningkatkan arus informasi.

Adapun menurut BAPPENAS, (2007) ada beberapa perangkat pendukung sebuah transparansi, yaitu:

1. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi
2. Pusat informasi
3. Website
4. Iklan layanan masyarakat
5. Media massa (media cetak dan media elektronik)

6. Papan pengumuman

7. Pameran pembangunan/ pameran keuangan daerah

Perangkat pendukung transparansi digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan dari aspek transparansi yang berkaitan dengan kepentingan dalam pelaporan keuangan yaitu untuk menciptakan kepercayaan dan hubungan timbal balik antara sektor publik yaitu Pemerintah selaku entitas pemerintahan dengan masyarakat. Implementasi transparansi ditujukan untuk membangun keyakinan publik kepada instansi-instansi pemerintah (sektor publik) adalah satuan kerja perangkat daerah yang bersih dan professional dalam melakukan tugasnya (Garini, 2011).

Dengan adanya transparansi yang ditingkatkan di lingkungan sektor pemerintahan maka akan mendorong publik untuk memahami situasi pada instansi publik atau pemerintah dengan demikian publik akan berpartisipasi aktif atas pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh instansi tersebut. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi (Garini, 2011).

2.1.6 Kebijakan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (PP Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II.02). Kebijakan dalam pelaporan keuangan mengenai informasi dalam laporan keuangan tersebut sangat relevan dengan topik penelitian. Informasi yang digunakan dalam laporan keuangan mencakup informasi keuangan dan informasi nonkeuangan yang berguna untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Uraian kebijakan akuntansi di atas sejalan dengan aspek transparansi dalam pelaporan keuangan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, dasar penyajian laporan keuangan tertuang dalam asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Dengan memenuhi ketiga asumsi dasar akuntansi ini entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya hal ini merupakan kaitan dengan aspek akuntabilitas.

Laporan keuangan mempunyai informasi yang berbeda-beda bagi pengguna laporan keuangan, seperti anggota legislatif, kreditur, karyawan dan publik. Selain itu pengguna laporan keuangan lainnya adalah pemasok, organisasi perdagangan, analisis keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi dan pihak yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Kewenangan entitas pemerintahan menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh akan membentuk kedisiplinan antar unit organisasi. Penyajian pelaporan keuangan yang ditujukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan tidak akan membuat kekacauan dalam pengambilan keputusan.

2.1.7 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan (SAP, 2010).

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen (PP Nomor 71 Tahun 2010) :

- a. Pertimbangan sehat. Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Substansi mengungguli bentuk formal. Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakikat transaksi dan realitas kejadian.

- c. Materialitas. Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan.

Isi Kebijakan Akuntansi

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan mengidentifikasi metode-metode kebijakan akuntansi yang digunakan. Metode-metode tersebut dapat mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai.

Terkait dalam paragraf 34 Lampiran II.05 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 dalam hal penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan, Pemerintah Kota Semarang selaku entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansinya secara utuh. Pengungkapan secara utuh dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat memanfaatkan keterangan kebijakan akuntansi sebagai informasi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lainnya.

Selain itu, pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan bertujuan agar laporan keuangan dapat dimengerti dengan baik. Pengungkapan kebijakan akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan sangat membantu pemakai laporan keuangan. Secara umum, kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan sebagai berikut (Lampiran II.05 PP Nomor 71 Tahun 2010) :

- a. Entitas pelaporan;
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;
- d. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam riset ini, kebijakan akuntansi sangat relevan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam suatu laporan keuangan maka membantu pembaca laporan untuk memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Pembaca laporan keuangan akan membentuk suatu kerangka dalam menganalisis informasi yang ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan kebanyakan dilakukan dalam paradigma positivisme dengan analisis statistik. Penelitian tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui penerapan basis akrual dengan menggunakan kualitatif interpretif belum banyak dilakukan di Indonesia. Kebanyakan penelitian implementasi basis akrual pada sektor pemerintah masih

dalam kesiapan dan pengaplikasian pendekatan baru ini. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan berhubungan dengan implementasi basis akrual.

Penelitian Arliana, (2011) bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh KPKNL Makassar sehingga mampu menerapkan basis akrual lebih awal. Responden dalam penelitian sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari pegawai KPKNL Makassar. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai KPKNL Makassar serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai KPKNL Makassar sudah memahami makna akuntansi berbasis akrual, gambaran umum pelaksanaan akuntansi pada KPKNL Makassar yang sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yaitu: komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia dan teknologi), sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang implementasi basis akrual yang lebih awal yaitu: integritas, profesionalisme (akuntabilitas dan komitmen), sinergi, pelayanan (ketulusan dan transparansi), serta kesempurnaan.

Penelitian Faradillah, (2013) ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan

berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPKD dan SKPD Kota Makassar. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Makassar diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penelitian Kusuma, (2013) bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemda kabupaten Jember dalam menerapkan SAP berbasis akrual yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi serta untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010 dan bagaimana model strategis akselerasi implementasi PP No 71 Tahun 2010. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD di Kabupaten Jember dan sampelnya adalah pegawai bagian akuntansi pada SKPD di Kabupaten Jember. Metode analisis data yang digunakan

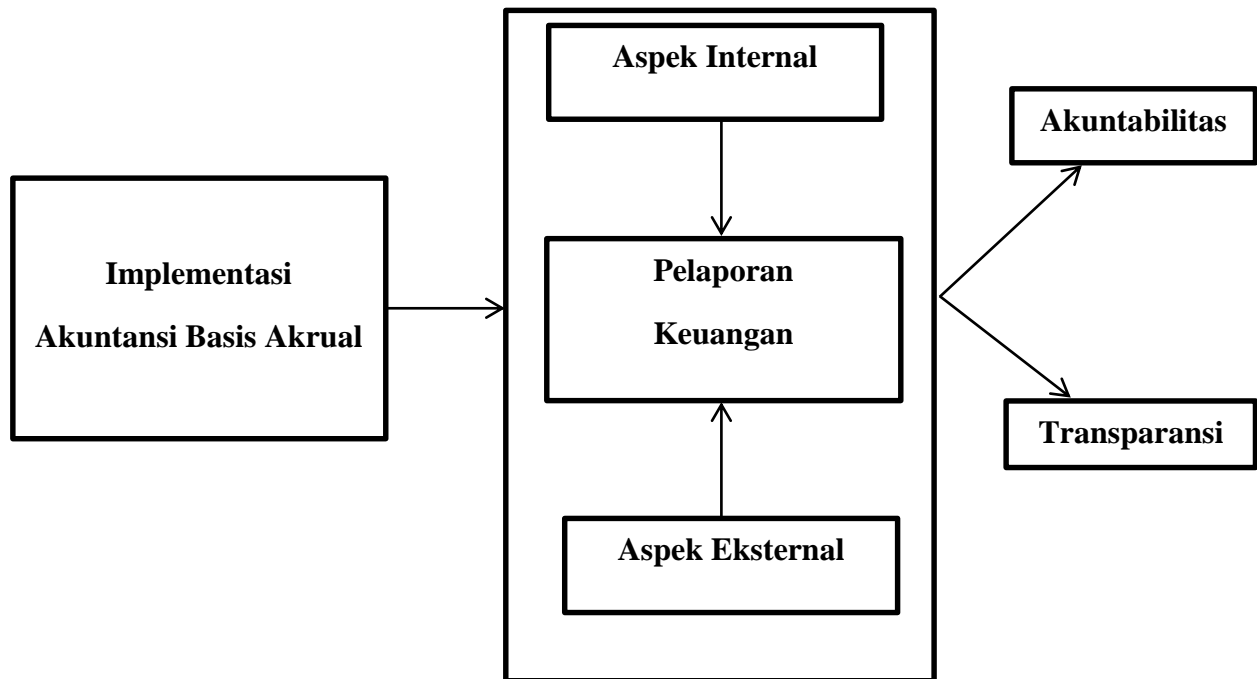
meliputi uji instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas) dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember cukup siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Masih ada beberapa kendala terkait dengan implementasi PP No 71 Tahun 2010 seperti : penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas dan kualitas masih belum cukup, kurangnya Bintek atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi. Sehingga model strategis akselerasi implementasi PP No 71 Tahun 2010 antara lain : dengan mengembangkan SAP berbasis akrual sesuai dengan kebutuhan, menyusun buletin teknis SAP berbasis akrual, mengembangkan SDM di bidang akuntansi pemerintahan.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Pemahaman mengenai bagaimana implementasi akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Semarang, dikaji berdasarkan teori institusional diperlukan suatu kerangka teoritis. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka kerangka teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut (lihat gambar 2.1):

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.1 menjelaskan tahapan implementasi akuntansi berbasis akrual pada pencatatan transaksi keuangan pada lembaga pemerintahan. Basis akrual dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan kepatuhan penerapan basis akrual terhadap perundang-undangan ini dikaji dengan teori institusional. Sebagai hasil dari implementasi basis akrual maka Pemerintah Kota Semarang melakukan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pada lembaga pemerintahan akan diidentifikasi dengan aspek internal dan aspek eksternal dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Bentuk laporan

keuangan yang dibuat ini digunakan sebagai media akuntabilitas dan transparansi publik dalam menerapkan basis akrual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Terpenuhinya validitas sebuah penelitian, setidaknya penelitian tersebut mengandung *ontology* (kenyakinan), *epistemology* (ilmu) dan metodologi yang digunakan. Oleh karena itu ketiga aspek tersebut menjadi sangat penting untuk membangun sebuah penelitian yang baik.

Penelitian ini didasarkan pada *ontology* bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual adalah praktik pelaporan keuangan yang dilakukan organisasi karena tuntutan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Hal ini menekankan pada pemahaman atas subjek dan analisis pada pernyataan subjektif yang dihasilkan seseorang. Oleh karena itu, keterlibatan seseorang pada arus kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting.

Analisis secara mendalam diperoleh ketika peneliti bertemu dan berinteraksi dengan subjek dan memahami pernyataan ekspresif yang muncul dari percakapan formal maupun informal. Sejalan dengan pemahaman mengenai realitas sosial hanya dapat dipahami oleh seseorang melalui pengetahuan langsung mengenai subjek yang diinvestigasi (Burrell & Morgan, 1979).

Berdasarkan aspek *ontology* tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan interpretif dan mengangkat fokus penelitian mengenai bagaimana informan memaknai akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Semarang yang dilakukan oleh dinas-

dinas terkait. Selain itu untuk memahami kesuksesan Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Penggunaan metode kuantitatif dirasa kurang tepat dalam penelitian ini, karena penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan makna atas esensi yang terjadi di objek penelitian. Metode kuantitatif tidak dapat mengungkapkan makna atau esensi tersebut melalui angka-angka akuntansi yang dianggap sebagai indikator variabel penelitian.

Melalui metode kualitatif peneliti percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002). Peneliti kualitatif bertujuan untuk memberikan makna atas fenomena secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi, sehingga temuan-temuan dalam studi kualitatif dipengaruhi oleh nilai dan persepsi peneliti. Jadi makna atau esensi sebuah fenomena dapat interpretasikan melalui data yang diperoleh oleh peneliti melalui serangkaian wawancara dengan informan di objek penelitian.

3.1.1 Pemilihan desain penelitian

Denzin dan Lincoln dalam Budiani, (2011) menyarankan pemilihan desain penelitian yang meliputi lima langkah berurutan, yaitu:

1. Menempatkan bidang penelitian (*field in quiry*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif / interpretif atau kuantitatif / verifikasional.

2. Pemilihan paradigma teoritis penelitian yang dapat memberitahukan dan memandu proses penelitian.
3. Menghubungkan paradigma penelitian yang dipilih dengan dunia empiris lewat metodologi.
4. Pemilihan metode pengumpulan data.
5. Pemilihan metode analisis data.

Pemilihan desain penelitian dalam penelitian ini dimulai dengan menempatkan bidang penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah berikutnya, memilih paradigma teoritis penelitian yaitu berupa paradigma interpretif yang memberikan pedoman terhadap pemilihan metodologi penelitian. Tahapan terakhir dalam desain penelitian adalah pemilihan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

3.1.2 Pendekatan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami makna atau esensi dan menganalisis kesuksesan Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini menyajikan informasi yang berbentuk kutipan wawancara dengan informan sebagai sumber data primer. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma interpretif lebih menekankan pada makna seseorang terhadap simbol. Interpretif disini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*), bukan *to*

explain dan *to predict* bukan seperti paradigma positivisme (Triyuwono, 2012). Selain itu paradig ini untuk mengungkapkan temuan-temuan yang bersifat lokal.

Paradigma interpretif memandang bahwa tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang objektif dan bebas dari nilai sepanjang dalam proses konstruksi teori melibatkan manusia. Manusia memiliki subjektivitas yang secara sadar akan menyatu dalam proses kontruksi ilmu pengetahuan (Triyuwono, 2012). Demikian pula dengan akuntansi dalam kondisi *vacuum* dari kondisi lingkungan dimana dipraktikkan. Akuntansi juga terbentuk melalui proses kontruksi sosial yang melibatkan manusia, sehingga pasti ada nilai-nilai lokal dari lingkungan, subjektivitas praktisi akuntansi dan masyarakat bisnis yang mempengaruhinya.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan informan. Informan penelitian ini diantaranya adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Verifikator, Staf Seksi Pelaporan, Bendahara Pengeluaran, dan Auditor pada dinas-dinas Pemerintah Kota Semarang.

Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) dan pihak yang terlibat secara langsung sehingga diharapkan peneliti mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasubag Keuangan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang
2. Kasubag Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.
3. Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang.
4. Kasubag Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.
5. Pegawai bagian verifikator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
6. Pegawai bagian staf seksi pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
7. Pegawai bagian bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kota Semarang.
8. Auditor pertama Inspektorat Kota Semarang.

3.3 LOKASI PENELITIAN DAN INFORMAN PENELITIAN

Penetapan lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu, Kota Semarang yang terletak di Propinsi Jawa Tengah. Kota Semarang dalam hal ini yang dijadikan sebagai *setting* penelitian adalah dinas-dinas terkait yang melakukan penerapana akuntansi basis akrual. Pemilihan *setting* ini juga menarik untuk diteliti karena pemerintah kota Semarang ini dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Peneliti memilih instansi pemerintah daerah yang tepat. Peneliti berusaha mengungkap dinamika SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Peneliti memilih SKPD terkait sebagai SKPD penghasil pendapatan dan SKPD yang bukan penghasil pendapatan karena akan berdampak saat penerapan basis akrual dalam penyusunan pelaporan keuangan SKPD tersebut dan memilih SKPD yang dijadikan SKPD induk dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan yang

dilakukan oleh DPKAD. Selain itu peneliti juga memilih lembaga pemerintah dibawah kepala daerah yaitu Inspektorat yang mengemban tugas dalam memonitoring, review laporan keuangan dan pengawasan jalannya pemerintahan di daerah tingkat kota. Mengenai instansi pemerintah yang ditetapkan oleh peneliti disajikan sebagai berikut, (lihat tabel 3.1).

Tabel 3.1
Daftar SKPD sebagai objek penelitian

No.	SKPD	Keterangan
1.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	SKPD induk dan dinas penghasil pendapatan
2.	Dinas Pasar	Dinas Penghasil Pendapatan
3.	Dinas Tata Kota dan Perumahan	Dinas Penghasil Pendapatan
4.	Dinas Kesehatan	Dinas Penghasil Pendapatan
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas bukan penghasil
6.	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas bukan penghasil
7.	Badan Kepegawaian Daerah	Dinas bukan penghasil
8.	Inspektorat	APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Sumber: diolah peneliti

Setelah menetapkan SKPD-SKPD yang terkait dengan lokasi penelitian dan sebelum memulai wawancara, peneliti meminta informan untuk terbuka, jujur dan tidak menutupi kegiatan sebenar-benarnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami implementasi akuntansi berbasis akrual di lingkungan sektor publik, khususnya Pemerintah Kota Semarang dalam pelaporan keuangan, sehingga tidak ada unsur atau kepentingan apapun dalam proses pengumpulan data dan hasil penelitian ini. Peneliti berusaha memilih informan yang

representatif dan kompeten dalam bidangnya sehingga hasil penelitian yang didapat dapat memberikan pemahaman mendetail dari praktik-praktik pelaksanaan basis akrual di Pemerintah Kota Semarang, aspek-aspek keberhasilan dalam menerapkan basis akrual dan interpretasinya dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Dalam menetapkan informan ada tiga cara dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut (Bungin, 2011):

- a. Prosedur purposive merupakan strategi dengan menentukan informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian.
- b. Prosedur kuota adalah cara menetapkan informan dengan menentukan dari awal tentang jumlah orang dengan karakteristik yang diinginkan yang akan dijadikan informan.
- c. Prosedur bola salju merupakan metode penetapan sampel dengan cara hanya menetapkan informan kunci diawal, selanjutnya informan-informan lain akan ditentukan kemudian.

Peneliti menggunakan prosedur purposive karena prosedur ini yang dinilai lebih tepat dengan penelitian kualitatif sesuai dengan topik masalah penelitian.

Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ikut terlibat dalam menggunakan anggaran dan menangani di bidang administrasi keuangan.
2. Ikut dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pada SKPD.
3. Ikut dalam pengawasan dan review laporan keuangan SKPD.

Berdasarkan kriteria di atas, informan yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari Kepala Sub Bagian Keuangan, Verifikator, Staf Seksi Pelaporan, Bendahara Pengeluaran, dan Auditor (lihat tabel 3.2)

Tabel 3.2
Daftar Informan Penelitian

No.	Jabatan Informan	Jumlah
1.	Kasubag Keuangan	4
2.	Bendahara Pengeluaran	1
3.	Verifikator (Pembuku)	1
4.	Auditor	1
5.	Staf Seksi Pelaporan	1
Jumlah		8

Sumber: diolah peneliti.

Tabel 3.2 menunjukkan daftar informan penelitian secara keseluruhan peneliti ini. Informan yang berasal dari kasubag keuangan terdiri dari 2 kasubag keuangan dari SKPD penghasil pendapatan sebagai informan utama dan 2 kasubag keuangan dari SKPD bukan penghasil pendapatan sebagai informan pendukung. Peneliti juga memilih verifikator dalam hal ini bertugas sebagai pembuku, bendahara pengeluaran, staf seksi pelaporan dan auditor sebagai pelengkap. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ketajaman hasil penelitian.

Saat melakukan perizinan dan membuat janji bertemu untuk melakukan penelitian kualitatif di SKPD-SKPD, peneliti diminta untuk memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Mengingat penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam belum terbiasa ditemui oleh informan di lapangan. Untuk itu strategi peneliti selalu memberikan penjelasan

singkat tentang penelitian kualitatif dan mengutarakan maksud dan tujuan berdasarkan masalah penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti. Penjelasan peneliti membuat informan di lapangan bersedia untuk menyatakan kesediaannya untuk melakukan wawancara hanya saja tanpa penyebutan nama asli mereka dalam tulisan peneliti. Bahkan ada beberapa dari informan yang secara langsung untuk tidak berkenan direkam selama proses wawancara. Peneliti menghargai sikap informan tersebut, sehingga ada beberapa wawancara yang memang tidak direkam oleh peneliti.

3.4 INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan. Untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan, *voice recorder*, dan kamera. Daftar pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan. *Voice recorder* digunakan untuk merekam yang dikemukakan oleh informan. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui pencatatan. Kamera digunakan untuk mengambil gambar dokumen yang dibutuhkan.

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling fundamental dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010:63) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, pada penelitian ini menggunakan interview (wawancara).

a. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan dua macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2010). Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam melalui sumber yang mendalami situasi dan lebih mengetahui akan informasi yang sedang diperlukan oleh pewawancara. Wawancara ini dilakukan secara individual dan ditempat terpisah dengan durasi antara tiga puluh menit hingga satu jam. Wawancara tersebut akan direkam melalui voice recorder dan juga dicatat secara manual.

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan seputar mengenai pemahaman mengenai definisi akuntansi berbasis akrual, penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintahan, khususnya Pemerintah Kota Semarang, mengenai kesuksesan Pemkot Semarang dalam menerapkan basis akrual, dan pertanyaan tentang penerapan basis akrual dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah khususnya Pemkot Semarang.

Hasil dari wawancara ini dapat memperoleh memberikan informasi secara mendalam mengenai seberapa penting penggunaan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah selaku sektor publik yang berbeda dengan sektor privat, memperoleh gambaran mengenai aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Kota Semarang dalam mengimplementasikan basis akrual, menganalisis manfaat riil dari basis akrual pada sektor pemerintahan, memperoleh tanggapan informan mengenai kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan setelah diterapkan akuntansi berbasis akrual dan mendapatkan gambaran utuh bagaimana peran akuntansi berbasis akrual dalam upaya

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan Pemkot Semarang.

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Metode analisis data adalah suatu proses mencari makna dari sekumpulan data sehingga dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian. Dengan kata lain, proses tersebut digunakan untuk memahami, menganalisis dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas pertanyaan- pertanyaan penelitian. Metode analisis data pada penelitian kualitatif berbeda dengan metode yang digunakan pada pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, metode analisis data menggunakan alat uji statistik, sedangkan pada pendekatan kualitatif, metode analisis data merupakan proses yang kompleks dan melibatkan penalaran induktif dan deduktif, serta deskripsi dan interpretasi sehingga tidak dapat diuji secara statistik.

Selain itu tidak ada pedoman yang pasti untuk menganalisis data yang diperoleh melalui proses wawancara. Data yang diperoleh melalui wawancara hanya berupa kata- kata yang diucapkan oleh informan dan peneliti harus dapat memproses kata- kata tersebut menjadi sebuah informasi yang berguna untuk penelitiannya.

Metode analisis data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah *data reduction* dan kedua adalah *data display*.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan (Basrowi dan

Suwandi, 2008). Data yang diperoleh dari proses wawancara diseleksi dan diorganisir melalui *coding* dan tulisan ringkas. Dalam mereduksi data, data- data yang tidak relevan dipisahkan dari data yang relevan dengan penelitian.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu (Arifah, 2013). Jadi, data yang digunakan diharapkan benar- benar data yang valid. Reduksi data mencakup beberapa kegiatan seperti berikut:

a. Organisasi data

Data hasil wawancara dibuat dalam bentuk transkrip wawancara kemudian dikelompokkan menurut format tertentu. Format yang digunakan dalam penelitian ini adalah nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan, tanggal wawancara, tempat wawancara, isi wawancara. Transkrip hasil wawancara dianalisis, lalu kata kuncinya dikumpulkan dalam tabel terpisah sekaligus diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kata kunci (*key points*) dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, yaitu mengenai makna pemahaman mengenai definisi akuntansi berbasis akrual, penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintahan, khususnya Pemerintah Kota Semarang, mengenai kesuksesan Pemkot Semarang dalam menerapkan basis akrual, dan pertanyaan tentang penerapan basis akrual dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah khususnya Pemkot Semarang.

b. *Coding* data

Coding merupakan sebuah langkah pemberian kode untuk sebuah data. Dalam penelitian ini data yang diperoleh diberi kode sesuai dengan pokok- pokok yang ada dalam pertanyaan penelitian.

c. Pemahaman dan mengujinya

Berdasarkan hasil coding, maka peneliti mulai memahami data secara rinci. Langkah selanjutnya adalah mencari teori maupun penelitian selanjutnya yang mendukung pembahasan.

2. Penyajian data (*data display*)

Miles dan Huberman (1992) menyarankan agar data ditampilkan dengan baik melalui tabel, *charts*, *networks* dan format gambar lainnya saat menarik kesimpulan. Hal ini berfungsi untuk memberi kemudahan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Selain untuk memudahkan, format tabel, *charts*, *networks* dan format gambar lainnya juga dapat menarik perhatian pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti disertai dengan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya temuan baru terkait implementasi akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pemkot Semarang.

Setelah dapat ditarik kesimpulan, peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman

antara peneliti dan informan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, atau minimal sesuai berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Hal ini disebut dengan langkah verifikasi.

3.7 PENGECEKAN VALIDITAS TEMUAN

Kredibilitas sebuah penelitian sangat berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya dan diterima. Sugiyono (2010:121) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek dan memeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Menggunakan bahan referensi, adanya pendukung dan pelengkap dapat dijadikan sebagai pembuktian data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil wawancara perlu ditunjang dengan adanya rekaman wawancara ataupun foto-foto sehingga dapat dipercaya.